

STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN DESA BUMI LESTARI DI DESA PENEPIAN RAYA, KABUPATEN KAPUAS HULU

*Bumi Lestari Village Forest Management Strategy
In Penepian Raya Village, Kapuas Hulu District*

Siti Puji Lestariningsih, Emi Roslinda, Siva Devi Azahra, dan Destiana

Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan
Universitas Tanjungpura

ABSTRACT. *The Village Forest Management Institution (LPHD) Bumi Lestari of Penepian Raya Village has obtained a forest management license since 2014. Village forest is one of the social forestry schemes that aims to improve community welfare through the management of forest natural resources. However, the management must be based on sustainable forest sustainability because the forest is a vital support. This study aims to formulate a management strategy for Bumi Lestari Village Forest based on internal (strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats) factors. The survey method was applied by collecting data through interviews with all administrators and members of LPHD Bumi Lestari. All internal and external factors were scored and weighted to find strategy priorities based on SWOT. Based on the value of all factors, the internal factor value was 0.52 and the external factor value was 0.92. Bumi Lestari Village Forest management strategy is in Quadrant I. Strategic opportunities on maximum utilization of strengths to use available opportunities. The existence of assistance and funding, can be utilized to increase institutional capacity in terms of administration, mastery of technology, and innovation of processed non-timber forest product derivatives. An effective marketing network is needed to overcome obstacles in the form of the large amount of transportation bias through waterways in the village. In the field of conservation, LPHD Bumi Lestari has been based on smart patrols but there is a need to increase the use of technology. Strengthening partnerships with the government, academics, private foundations, and fellow LPHDs can be a strength for LPHD Bumi Lestari for better village forest management.*

Keywords: *Bumi Lestari; Village forest; Management strategy; SWOT*

ABSTRAK. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Bumi Lestari Desa Penepian Raya telah memperoleh ijin pengelolaan hutan sejak tahun 2014. Hutan desa merupakan salah satu skema perhutanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam hutan. Akan tetapi, pengelolaan tersebut harus berbasis kelestarian hutan yang berkelanjutan karena hutan menjadi penopang yang vital. Adanya penelitian ini untuk menghasilkan rumusan strategi pengelolaan Hutan Desa Bumi Lestari berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman). Metode survei diterapkan dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap seluruh pengurus dan anggota LPHD Bumi Lestari. Seluruh faktor internal dan eksternal dilakukan skoring dan pembobotan untuk menemukan prioritas strategi berdasarkan SWOT. Berdasarkan nilai seluruh faktor, diperoleh nilai faktor internal 0,52 dan faktor eksternal 0,92. Strategi pengelolaan Hutan Desa Bumi Lestari berada pada Kuadran I. Peluang strategi pada pemanfaatan kekuatan secara maksimal untuk menggunakan peluang yang tersedia. Adanya pendampingan dan pendanaan, dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan dalam hal administrasi, penguasaan teknologi, dan inovasi olahan produk turunan hasil hutan bukan kayu. Jaringan pemasaran yang efektif diperlukan untuk mengatasi kendala berupa besarnya biaya transportasi melalui jalur air di desa tersebut. Dalam bidang konservasi, LPHD Bumi Lestari telah berbasis smart patrol tetapi perlu adanya peningkatan penggunaan teknologi. Penguatan kemitraan dengan pemerintah, akademisi, yayasan swasta, dan sesama LPHD dapat menjadi kekuatan bagi LPHD Bumi Lestari untuk pengelolaan hutan desa yang lebih baik

Kata kunci: Bumi Lestari; Hutan desa; Strategi pengelolaan; SWOT)

Penulis untuk korespondensi, surel: siti.puji@fahatan.untan.ac.id

PENDAHULUAN

Hutan merupakan suatu ekosistem yang memiliki fungsi ekologis, biologi, dan sosial ekonomi. Fungsi ekologis hutan sebagai penyerap emisi karbon, mengendalikan unsur iklim, dan menjaga tata kelola air. Hutan sebagai tempat hidup dan memenuhi kebutuhan hidup makhluk hidup sehingga berperan menjaga biodiversitas. Pemanfaatan sumber daya hutan sebagai sumber ekonomi dan penghidupan merupakan fungsi hutan dalam bidang sosial ekonomi (Putra, 2018; Matnuril et al., 2019). Berdasarkan PP RI No 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan, fungsi kawasan hutan dibedakan menjadi hutan lindung, hutan konservasi (cagar alam, suaka), kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam), hutan produksi, dan hutan produksi terbatas (Sekartaji et al., 2023).

Pemantauan terus-menerus terhadap pengelolaan kawasan hutan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya telah menjadi perhatian utama. Tujuannya adalah agar komunitas yang tinggal di sekitar hutan dapat tetap memanfaatkan serta memperoleh akses yang memadai untuk memanfaatkan sumber daya alam mereka (Permana, 2019). Sejalan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memberikan ruang dan hak akses kepada masyarakat sekitar hutan terhadap kawasan hutan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menlhk//2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Meskipun Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 menegaskan pentingnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara, situasi pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia saat ini menunjukkan ketidakmemuaskan, terlihat dari terus berlanjutnya deforestasi dan degradasi hutan (Kardiman, 2022; Kirana et al., 2022).

Penetapan status hutan menjadi hutan desa merupakan upaya untuk memperoleh legalitas pengelolaan swadaya oleh masyarakat desa terhadap sumber daya hutan. Tujuan dari hutan desa yaitu masyarakat mendapatkan keamanan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan dan

ekonomi. Tujuan tersebut harus beriringan dengan tujuan pelestarian hutan sehingga upaya-upaya pemanfaatan tetap memperhatikan aspek ekologi untuk pembangunan berkelanjutan (Norsidi, 2019; Azwar et al., 2021).

Hutan desa Bumi Lestari yang terletak di Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu. Hak Pengelolaan Hutan Desa Bumi Lestari sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor. SK. 400/EKBANG/2015 tanggal 13 Februari 2015. Adanya hak pengelolaan tersebut, maka kepala desa Penepian Raya bersama masyarakat berkomitmen untuk melakukan upaya konservasi hutan dengan pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

Karakteristik secara geofisik Hutan Desa Bumi Lestari menjadi tantangan bagi upaya pengelolaan konservasi hutan. Kawasan hutan desa Bumi Lestari dikelilingi oleh Danau Tang dengan tutupan lahan dominan hutan lahan kering sekunder dan hutan rawa gambut. Akses menuju hutan desa ditempuh dengan motor air atau speed yang membutuhkan biaya untuk bahan bakar lebih tinggi daripada akses jalan darat. Kelompok usaha perhutanan sosial yang dikelola oleh LPHD Bumi Lestari terdiri dari 5 jenis usaha yaitu petani madu, ikan, pengolahan pangan dari ikan, kerajinan rotan, dan ekowisata. Usaha tersebut memerlukan pendampingan dalam hal produksi dan pemasaran. Jika dikaitkan dengan aspek geografisnya, maka LPHD Bumi Lestari menghadapi tantangan berupa jarak dari lokasi produksi menuju jangkauan pasar produk. Oleh karena itu diperlukan penelitian tentang strategi pengelolaan Hutan Desa Bumi Lestari untuk merumuskan rencana pengelolaan yang akan dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konservasi hutan.

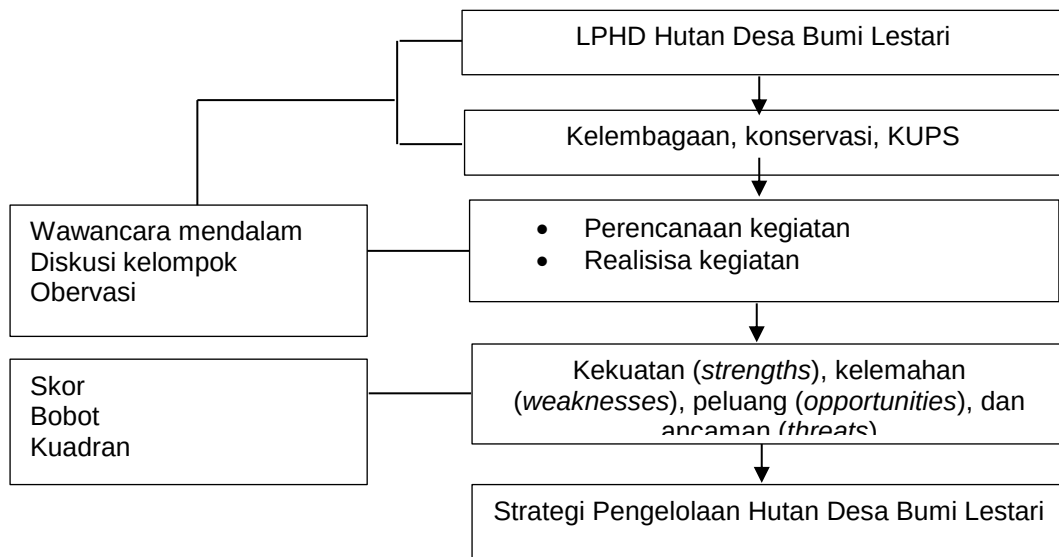
METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan metode observasi. Penelitian dilakukan untuk menarik rumusan pemecahan masalah dari suatu lembaga atau masyarakat melalui pendekatan studi kasus terhadap proses, aktivitas, dan program yang dilakukan dalam masyarakat. Data primer dalam penelitian ini berupa data kegiatan usaha perhutanan sosial yang

dilakukan oleh KUPS di Desa Penepian Raya, program kerja, kendala yang dihadapi, dan rencana pengembangan usaha. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara mendalam dan diskusi mendalam. Responden data primer yaitu pengurus dan anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa Bumi Lestari, Kelompok usaha perhutanan sosial, Kepala Desa Penepian Raya, dan pendamping LPHD. Data sekunder berupa data fungsi kawasan hutan dan batas spasial hutan desa Bumi Lestari. Peta fungsi kawasan bersumber dari Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia SK.733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat. Peta batas spasial hutan desa Bumi Lestari bersumber dari arsip dokumen digital LPHD Bumi Lestari.

Data primer dan sekunder yang telah diperoleh disederhanakan dalam bentuk pengelompokan untuk memudahkan dalam memperoleh hasil penelitian dan kesimpulan. Pengolahan data meliputi 3 tahapan yaitu pengelompokan data atau reduksi, penyajian data, dan perumusan kesimpulan (Wijaya et al., 2020). Data hasil wawancara dan diskusi kelompok direduksi menjadi kelompok informasi program usaha perhutanan sosial,

kendala, strategi internal dan eksternal dalam pengembangan usaha perhutanan sosial. Data spasial berupa peta hutan desa Bumi Lestari disajikan dalam bentuk peta. Data yang diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok disajikan dalam bentuk tabel SWOT meliputi unsur kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Masing-masing faktor internal dan eksternal diberikan bobot oleh responden berdasarkan prioritas masing-masing faktor. Skor yang dikalikan bobot menjadi nilai parameter yang dijumlahkan menjadi nilai faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selisih nilai kekuatan dan kelemahan menjadi nilai faktor internal yang menempati sumbu X pada kuadran. Selisih faktor peluang dan ancaman menjadi nilai eksternal yang merupakan nilai sumbu Y. Penggambaran nilai X dan Y pada kuadran akan menghasilkan rumusan strategi yang tepat (Abdillah, 2020; Syarifuddin et al., 2022). Berdasarkan data tersebut ditarik kesimpulan deskriptif tentang strategi pengembangan usaha perhutanan sosial di kawasan hutan desa Bumi Lestari.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Program LPHD Bumi Lestari

Perencanaan program Lembaga Pengelola Hutan Desa Bumi Lestari disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi di kawasan hutan desa tersebut. Penyusunan perencanaan dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2020 ditetapkan Rencana Kegiatan Pendampingan Perhutanan Sosial Hutan Desa Bumi Lestari untuk program mulai tahun 2021.

Kelembagaan

Permasalahan kelembagaan di LPHD Bumi Lestari berkaitan dengan kemampuan menyusun Rencana Kerja Tahunan dan penguasaan administrasi serta pelaporan yang menjadi syarat pertanggungjawaban. Administrasi organisasi menjadi bagian yang vital karena merupakan bukti pelaksanaan program serta pertanggungjawaban kepada pimpinan kegiatan. Analisis perencanaan kegiatan lembaga pengelola hutan desa bidang kelembagaan mencakup dua aspek utama, yakni pelatihan administrasi dan penyusunan rencana kerja tahunan. Pelatihan administrasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga pengelola hutan desa dalam hal pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien. Materi pelatihan administrasi dapat mencakup pengelolaan data dan dokumentasi, pengelolaan keuangan, serta penyusunan laporan kegiatan. Metode pelaksanaan pelatihan melibatkan pendekatan praktis seperti pelatihan langsung, diskusi kelompok.

Penyusunan rencana kerja tahunan berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pengelola hutan desa. Tahapan penyusunan rencana kerja tahunan meliputi identifikasi kegiatan prioritas yang sesuai dengan tujuan dan visi lembaga, penetapan anggaran kegiatan, dan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan. Proses ini dapat melibatkan partisipasi dari berbagai pihak terkait dalam lembaga pengelola hutan desa. Dengan adanya perencanaan yang baik, diharapkan lembaga pengelola hutan desa dapat mengoptimalkan kegiatan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada aspek kelembagaan,

perencanaan dan pelaksanaannya meliputi 3 kegiatan.

a. Memfasilitasi Penyusunan RKT Tahun 2021 di LPHD Bumi Lestari di Desa Penepian Raya

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) adalah instrumen penting dalam pengelolaan hutan desa. Proses penyusunan RKT Tahun 2021 di LPHD Bumi Lestari merupakan langkah awal yang strategis untuk merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Beberapa poin yang perlu diperbincangkan dalam pembahasan ini antara lain: 1) Partisipasi masyarakat berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKT, 2) Aspek lingkungan dan Sosial berkaitan dengan pertimbangan RKT terhadap sasaran kegiatan yang mencakup aspek kelembagaan, termasuk konservasi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat lokal, dan 3) Ketepatan target berkaitan dengan penetapan target yang realistis dan terukur.

b. Memfasilitasi Penyusunan Proposal Bantuan Fasilitas Sarpras untuk LPHD Bumi Lestari di Desa Penepian Raya

Pengelolaan hutan desa memerlukan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Penyusunan proposal bantuan fasilitas sarana prasarana (sarpras) menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas lembaga pengelolaan hutan desa. Beberapa aspek yang perlu dibahas berkaitan dengan kebutuhan sarana prasarana, kemitraan dan kolaborasi, serta keberlanjutan. LPHD Bumi Lestari pada awalnya belum memiliki sarana prasarana yang memadai dalam operasional kegiatan dan administrasi. Namun dengan adanya program Tropical Forest Conservation Act (TFCA) dan pendampingan dari Yayasan PRCF Indonesia, LPHD Bumi Lestari secara bertahap mendapatkan fasilitas sarana prasarana. LPHD Bumi Lestari menempati gedung milik desa yang berlokasi di depan Kantor Balai Desa Penepian Raya untuk operasional. Fasilitas yang dimiliki berupa peralatan lapangan (pelampung, tas, tenda, *hammock*, kompor *portable*), laptop, printer, GPS, kamera trap, peralatan dapur, dan *speedboat* untuk transportasi. Berkaitan dengan kemitraan, LPHD Bumi Lestari didampingi Yayasan PRCF Indonesia mendapatkan pendanaan dari lembaga donor, berkolaborasi dengan pihak pemerintah dan swasta dalam kegiatan

konservasi maupun peningkatan kapasitas kelembagaan. LPHD Bumi Lestari mendapatkan kontrak pendampingan, di mana pada tahun ke-3 akan mendapatkan kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial dan pembangunan Kantor LPHD.

c. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2021 di Desa Penepian Raya

Evaluasi pelaksanaan RKT Tahun 2021 adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Perencanaan pada tahap evaluasi mempertimbangkan kriteria evaluasi, tantangan dan hambatan, partisipasi masyarakat, dan rekomendasi perbaikan. Pada pelaksanaannya, evaluasi dilakukan setiap bulan oleh LPHD Bumi Lestari. Evaluasi berkala ini untuk memudahkan dalam perbaikan. Evaluasi dilaksanakan melalui rapat mencakup aspek keuangan, lingkungan, dan usaha perhutanan sosial yang sedang berjalan. Apabila terdapat kerjasama dengan pihak akademisi atau lainnya, LPHD Bumi Lestari melakukan evaluasi pada akhir kegiatan. Tantangan dan hambatan yang ditemui juga menjadi topic pembahasan dalam evaluasi pelaksanaan RKT. Salah satunya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan mekanisme umpan balik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan evaluasi, maka dirumuskan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian yang dapat dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Konservasi

Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian hutan desa dan lingkungan sekitarnya. Berikut adalah pembahasan mengenai perencanaan dan pelaksanaan program kerja lembaga pengelola hutan desa di Desa Penepian Raya, khususnya dalam bidang konservasi, yang mencakup dua kegiatan utama: Memfasilitasi Patroli bersama kelompok KUPS/LPHD bersama dengan aparat desa Penepian Raya dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran di Kawasan Hutan Desa.

a. Memfasilitasi Patroli Bersama

Perencanaan

- Penetapan wilayah patrol dengan identifikasi wilayah hutan desa yang memerlukan pemantauan intensif.

Salah satu kegiatannya meninjau sejarah aktivitas ilegal atau destruktif yang dapat merugikan keseimbangan ekosistem.

- Keterlibatan KUPS/LPHD dalam patrol hutan dan kawasan, termasuk mengikuti pelatihan terkait identifikasi jejak ilegal dan teknik patroli yang efektif.
- Kerjasama dengan aparat desa untuk mendukung kegiatan patroli, termasuk perizinan dan koordinasi logistik.

Pelaksanaan

- Patroli rutin yang dilakukan sebulan 1 kali oleh LPHD Bumi Lestari secara rutin. Anggota yang mengikuti patrol telah ditetapkan berdasarkan tupoksi dan kesepakatan. Patroli hutan desa menjadi tanggung jawab Seksi Konservasi. Kegiatan patrol selain memantau kerawanan kebakaran hutan dan lahan, LPHD Bumi Lestari juga melakukan pengukuran tinggi muka air gambut secara manual dan otomatis. Pengukuran TMAP gambut merupakan kegiatan wajib yang dilakukan untuk menghimpun data TMAP series guna melihat potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- Kegiatan konservasi telah memanfaatkan teknologi seperti GPS untuk mencatat rute patroli dan lokasi kegiatan serta memberikan tanda lokasi pada temuan penting di lapangan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan. Selain itu LPHD memiliki peralatan lain seperti kamera trap yang dapat digunakan untuk memantau keberadaan satwa liar dalam hutan.
- Evaluasi hasil patroli secara berkala dilakukan setelah melakukan patroli. Hal ini dilakukan untuk meninjau adanya peningkatan atau penurunan aktivitas di dalam hutan desa, dan lakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan.

b. Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

Perencanaan

- Identifikasi area hutan desa yang rentan terhadap kebakaran dengan meninjau pola cuaca dan aktivitas manusia yang dapat meningkatkan risiko kebakaran.

- Merancang materi sosialisasi yang informatif, mencakup pencegahan kebakaran, teknik pemadaman sederhana, dan peran masyarakat dalam pengendalian kebakaran.
- Koordinasikan dengan pihak terkait seperti pemadam kebakaran setempat, instansi lingkungan, dan lembaga terkait untuk mendukung program sosialisasi.

Pelaksanaan

- Sosialisasi bersama masyarakat dengan melibatkan warga, kelompok KUPS/LPHD, dan aparat desa. Materi sosialisasi telah menggunakan media yang efektif, seperti ceramah, presentasi, dan video.
- Simulasi pemadaman kebakaran untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
- Pengukuran kesadaran masyarakat terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi melalui pengamatan terhadap kebiasaan masyarakat dan upaya pengendalian.

Usaha Perhutanan Sosial

Hutan desa merupakan salah satu dari skema perhutanan sosial. Tujuannya untuk memberikan hal pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, tujuan tersebut harus selaras dengan upaya

pelestarian hutan. Oleh karena itu salah satu kegiatan pengelolaan hutan desa yaitu usaha perhutanan sosial. Usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan dan sekitarnya. Kelompok usaha perhutanan sosial dibentuk sebagai wadah untuk memanfaatkan potensi lokal sekitar Hutan Desa Bumi Lestari sebagai sumber ekonomi. KUPS memiliki peran peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha yang dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Hutan Desa Bumi Lestari dan sekitarnya menyimpan potensi hasil hutan bukan kayu berupa madu, ikan, bambu, dan daya tarik wisata. Namun, pengelolaan potensi sumber daya alam tersebut menghadapi tantangan yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Hal ini mengakibatkan terhambatnya keberhasilan KUPS untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seperti yang diharapkan. Berjalannya kegiatan KUPS didukung oleh pengelola LPHD, pengelola KUPS, dan juga masyarakat di Desa Penepian Raya. Kajian tentang faktor internal dan eksternal yang menjadi peluang, potensi, hambatan, dan ancaman menjadi hal penting untuk menggali permasalahan belum optimalnya hasil KUPS. Data tersebut menjadi rujukan untuk menyusun strategi pengembangan usaha perhutanan sosial sehingga dapat terlaksana dengan lebih baik. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Bumi Lestari menyusun 7 rencana kegiatan berkaitan dengan usaha perhutanan sosial yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Program Kegiatan Bidang Usaha Perhutanan Sosial

No	Kegiatan
1	Mamfasilitasi kegiatan KUPS dengan LPHD Bumi Lestari di Desa Penepian Raya
2	Memfasilitasi Ijin Usaha KUPS Melati di LPHD Bumi Lestari
3	Membuat proposal perizinan membangun rumah sarang walet di hutan desa
4	Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan bimbingan teknis pengembangan ekowisata melaui sosial media Instagram dan Youtube pada KUPS ekowisata di Penepian Raya
5	Memfasilitasi Pengembangan Usaha dan Pelatihan pembuatan krupuk,naget dan sosis di KUPS Cendrawasih di desa Penepian Raya
6	Menfasilitasi dalam pengajuan sertifikasi halal pada hasil produk LPHD Bumi Lestari
7	Teknis pemanenan dan pengemasan madu tikung di KUPS Madu Hutan Organik Tang-Miman Kelompok madu tikung organik

Strategi Pengelolaan Hutan Desa Bumi Lestari

Kelompok usaha perhutanan sosial di Desa Penepian Raya terdiri dari 5 kelompok yaitu kelompok Candrawasi, Melati, Budidaya ikan Bumi Lestari, Madu hutan

Miman dan Tang, serta Ekowisata yang ditetapkan pada tahun 2015. Kelompok Candrawasi dan Melati merupakan usaha perhutanan sosial yang fokus kegiatannya pada pengolahan pangan hasil ikan seperti kerupuk, ikan asin, dan abon ikan. Kedua tersebut termasuk dalam KUPS emas, yaitu

kelompok yang sudah memiliki usaha dan melakukan pemasaran produk. KUPS Budidaya ikan Bumi Lestari, Madu hutan Miman dan Tang, serta Ekowisata termasuk kategori perak. Kemandirian KUPS yang tergolong perak artinya sudah tersusun rencana kerja usaha dan telah melakukan kegiatan dalam usaha seperti produksi dan pemanenan. Kelompok Candrawasi dan Melati berjumlah 10 orang, sedangkan kelompok budidaya ikan, madu, dan ekowisata beranggotakan 12-20 orang. Produk yang dihasilkan oleh KUPS Candrawasi dan Melati berupa ikan asin, kerupuk ikan, dan abon ikan. Ikan asin terdiri dari ikan toman, lais, dan tapah yang dijual seharga Rp 40.000,00 – Rp 65.000,00 ribu rupiah per kilogram tergantung jenis dan ukuran ikan. Kerupuk ikan dijual mulai dari Rp 20.000,00 per bungkus, sedangkan abon ikan dihargai Rp 25.000,00 per bungkus. Ikan asin, kerupuk ikan, dan abon ikan produksi KUPS Candrawasi dan Melati dikirim ke Kecamatan Jongkong dengan menggunakan speed boat atau motor air untuk dipasarkan ke beberapa daerah. Bahkan, produk kerupuk ikan dan abon ikan telah dipasarkan di Galeri Hasil Hutan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

KUPS petani madu beroperasi ketika musim panen madu yang berlangsung 2 kali dalam setahun. Hutan Desa Bumi Lestari kaya akan sumber pangan madu seperti pohon bungur dan air mata pengantin sehingga kaya akan hasil madu. Madu yang

dipanen dikemas dalam botol berbagai ukuran untuk dipasarkan. KUPS ekowisata hutan Miman dan Tang bergerak menyediakan paket wisata susur danau Tang, mendaki dan camping di Bukit Tang. Wisata alam danau dan bukit Tang merupakan daya Tarik wisata yang dapat dikemas sebagai bisnis ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat Desa Penepian Raya. Paket wisata yang ditawarkan yaitu penjemputan di Kecamatan Jongkong, susur danau, mendaki bukit, camping ground di puncak bukit, dan kuliner ikan. Peminat wisata tersebut berasal dari dalam dan luar negeri karena panoramanya memiliki kemiripan dengan obyek wisata yang terkenal di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Danau Sentarum. Kelompok budidaya ikan Bumi Lestari fokus pada kegiatan menjual ikan yang diperoleh dari hasil jermal (jaring) dan budidaya. Penangkapan ikan di Danau Tang menggunakan cara jermal dengan ukuran kurang lebih 30 x 10 meter yang dikelola oleh kelompok. Digunakan sistem pengundian untuk kelompok yang memiliki hak menjaring ikan dengan jermal untuk menghindari perselisihan. Pada awal tahun dilakukan tahapan pendaftaran dan pengundian. Setiap jermal dikelola oleh 1 kelompok yang hasilnya dibagi antar anggota kelompok sesuai kesepakatan bersama. Hasil ikan sebagian besar dikirim ke Kecamatan Jongkong untuk dipasarkan dan sebagian menjadi bahan ikan asin dan olahan pangan ikan.

Faktor Kekuatan (Strength)

Tabel 2. Faktor Kekuatan LPHD Bumi Lestari

No	Kekuatan (Faktor Internal)	Bobot	Rating	BxR
1	Adanya pendampingan dari yayasan PRCF	0,07	5	0,35
2	Kepengurusan LPHD sudah terbagi berdasarkan seksi/divisi	0,05	2	0,1
3	Sudah memiliki perijinan, baik LPHD maupun KUPS	0,15	4	0,6
4	Adanya dukungan dari pemerintah desa	0,08	1	0,08
5	Adanya upah/honor bagi LPHD	0,1	3	0,3
6	Sumber daya alam yang potensial dimanfaatkan sebagai ide bisnis untuk kelangsungan usaha	0,2	5	1
7	Kesamaan budaya memudahkan dalam komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat	0,05	3	0,15
8	Adanya pemberdayaan masyarakat sebagai pendukung dalam kegiatan LPHD	0,15	2	0,3
9	Pemanfaatan hasil hutuan bukan kayu	0,15	3	0,45
Total Kekuatan		1		3,33

Kekuatan yang dimiliki LPHD Bumi Lestari salahsatunya adalah mnedapatkan pendampingan sekaligus pendanaan dari Yayasan PRCF Indonesia. Dengan adanya pendampingan, maka lembaga lebih mudah mengakses pendanaan dan kemitraan. Hal ini merupakan dukungan untuk mendapatkan berbagai macam pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk lembaga maupun pemberdayaan masyarakat. LPHD Bumi Lestari mendapatkan pendampingan sejak tahun 2021. Terdapat 1 orang pendamping yang bertanggungjawab membantu LPHD Bumi Lestari dalam penyusunan rencana, pelaksanaan program, serta pelaporan. Kegiatan LPHD dalam pengelolaan hutan sudah mendapatkan ijin dan legalitas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 400/EKBANG/2015 tanggal 13 Februari 2015. Pemerintah desa mendukung kegiatan LPHD dengan menyelaraskan kegiatan LPHD dengan program kerja desa. Selain itu, pihak desa memberikan dukungan berupa anggaran setiap tahunnya. Kekuatan yang terpenting bagi LPHD Bumi Lestari yaitu alam yang menjadi sumber daya potensial untuk dikembangkan. Potensi alam di Desa Penepian berupa hutan, Danau Tang, dan Bukit Tang dapat dikelola menjadi ekowisata.

Potensi lainnya berupa hasil madu dan ikan yang menjadi andalan KUPS di Desa Penepian Raya. Terdapat 9 kekuatan yang dimiliki oleh LPHD Bumi Lestari (Tabel 2).

Faktor Kelemahan (*Weaknes*)

Kelemahan utama yang dimiliki LPHD Bumi Lestari yaitu penguasaan teknologi yang masih terbatas dan motivasi kelompok yang masih perlu ditingkatkan. Fasilitas teknologi yang telah diberikan oleh lembaga pendamping sudah memadai, yang terdiri dari laptop, printer, GPS, kamera trap, dan HT. Namun, kamrea trap belum digunakan secara optimal karena keterbatasan kemampuan dalam operasional alat tersebut. Kemampuan untuk memetakan wilayah dan hasil temuan patrol juga masih terbatas. Oleh karena itu, telah diadakan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota LPHD. Adapun pelatihan yang telah diikuti yaitu pelatihan smart patrol, pemetaan, pilot drone, dan administrasi. Ditinjau dari KUPS, beberapa kelemahannya berkaitan dengan inovasi jenis produk yang belum beragam, pengemasan produk, dan pemasaran. Adapun faktor kelemahan LPHD bumi Lestari pada Tabel 3.

Tabel 3. Faktor Kelemahan LPHD Bumi Lestari

No	Kelemahan (Faktor Internal)	Bobot	Rating	BxR
1	Penguasaan teknologi masih terbatas	0,13	4	0,52
2	Bergantung pada alam untuk usaha perhutanan sosial	0,07	2	0,14
3	Kemampuan menyusun kelengkapan administrasi masih belum optimal	0,2	3	0,6
4	Menggunakan teknik manual dalam pengolahan pangan dari ikan	0,05	1	0,05
5	Produk belum memiliki kekhasan yang membedakan dengan produk lain	0,1	1	0,1
6	Motivasi kelompok masih lemah	0,2	4	0,8
7	Lokasi jauh dengan trannsportasi air	0,15	2	0,3
8	Beberapa produk KUPS masih dikemas dengan packaging dan desain sederhana	0,05	3	0,15
9	Pemasaran produk secara digital belum optimal karena lemahnya akses internet di lokasi	0,05	3	0,15
Total Kelemahan		1		2,81

Faktor Peluang

Perhutanan sosial sedang menjadi topik unggulan dalam bidang kehutanan disamping ekonomi hijau dan perdagangan karbon. Perhutanan dengan 5 skema diharapkan mampu mengurangi ancaman

degradasi dan deforestasi karena illegal logging maupun alih fungsi tutupan hutan. Kegiatan destrutif yang terjadi di dalam hutan tentu untuk tujuan ekonomi sehingga dengan skema hutan desa masyarakat diberikan hal untuk mengelola hutan. Hasil pengelolaan tersebut dapat memberikan pemasukan

pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan sehingga keinginan untuk melakukan degradasi dan deforestasi dapat berkurang. Pemerintah bersinergi dengan lembaga, yayasan, institusi, akademisi, dan masyarakat untuk mendukung perhutanan sosial. Oleh karena itu, pasar terbuka luas untuk menerima produk-produk usaha perhutanan sosial. Terdapat galeri hasil hutan terbesar di Kota Pontianak Kalimantan Barat yang dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Tujuannya, menjadi

wadah pemasaran bagi usaha perhutanan sosial yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sehingga dekat dengan pasar dan dapat dikenal lebih luas. Kemitraan dan kerjasama banyak terjalin untuk meningkatkan perhutanan sosial. Bentuknya berupa kolaborasi dalam pelatihan kelompok usaha perhutanan sosial, baik untuk produksi, pengemasan, maupun pemasaran menggunakan media sosial. Faktor peluang LPHD Bumi Lestari tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Faktor Peluang LPHD Bumi Lestari

No	Peluang (Faktor Eksternal)	Bobot	Rating	BxR
1	Adanya mitra yang melakukan kajian dan menjadi narasumber untuk berbagi macam pelatihan	0,16	1	0,16
2	Terbukanya peluang untuk bekerjasama untuk peningkatan kapasitas kelompok	0,11	3	0,33
3	Adanya peluang pendanaan dari yayasan pendamping	0,22	3	0,66
4	Adanya wadah yang dapat bekerjasama dalam pengembangan inovasi produk dan desain produk	0,08	1	0,08
5	Transportasi air dapat diakses setiap hari sehingga distribusi produk usaha dapat dilakukan setiap hari	0,06	1	0,06
6	Adanya pasar dan konsumen untuk produk perhutanan sosial	0,2	4	0,8
7	Adanya media sosial sebagai wadah promosi ekowisata dan produk KUPS	0,17	2	0,34
Total Peluang		1		2,43

Faktor Ancaman

Ancaman paling besar bagi LPHD Bumi Lestari yaitu cuaca seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5. Hasil hutan bukan kayu dan olahan ikan di Hutan Desa Bumi Lestari bergantung dari cuaca. Hasil madu tahun 2023 berkurang dibandingkan tahun 2022. Kemarau panjang yang terjadi mengakibatkan tanaman kering sehingga

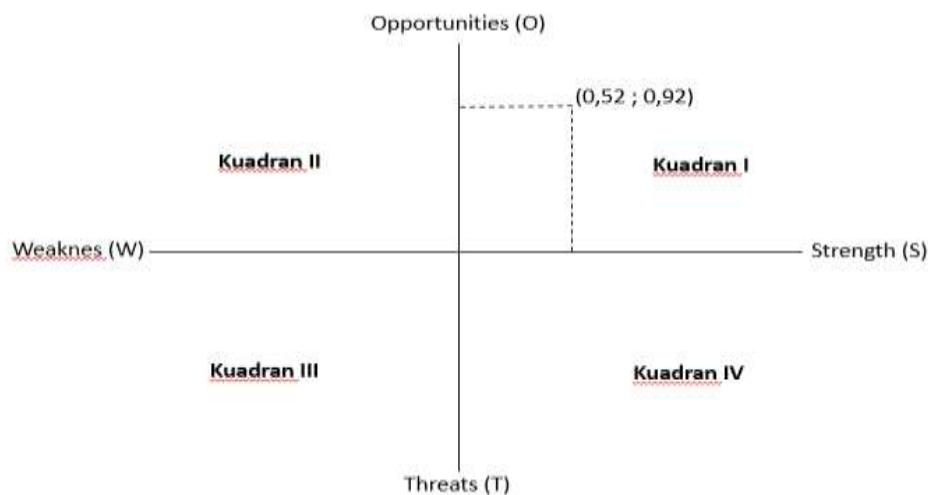
berkurang nectar pada tanaman sehingga lebah kekurangan makanan. Tahun 2023 terdapat program revisi batas hutan desa karena bersinggungan dengan desa lain. Namun, perubahan tersebut belum disahkan. Selain itu, akses yang menghubungkan Desa Penepian Raya dengan pusat perdagangan hanya dapat diakses melalui jalur air. Hal ini memakan biaya yang tinggi.

Tabel 5. Faktor Ancaman LPHD Bumi Lestari

No	Ancaman (Faktor Eksternal)	Bobot	Rating	BxR
1	Kesadaran masyarakat dalam pelestarian hutan masih kurang	0,2	1	0,2
2	Cuaca mengakibatkan hasil KUPS menjadi berkurang	0,18	3	0,54
3	adanya usaha lain sehingga tidak fokus pada usaha perhutanan sosial	0,07	1	0,07
4	Biaya transportasi besar	0,15	2	0,3
5	Adanya produk lain yang sejenis yang diproduksi oleh masyarakat di Kalimantan Barat	0,2	2	0,4
6	Revisi batas hutan desa belum disahkan	0,1	2	0,2
7	Adanya penambangan emas yang meresahkan bagi kualitas air	0,1	2	0,2
Total Ancaman		1		1,51

Berdasarkan nilai faktor internal dan eksternal maka diperoleh nilai faktor internal yaitu selisih kekuatan dan kelemahan yaitu 0,52. Faktor eksternal yang merupakan selisih peluang dan ancaman bernilai 0,92. Potensi pengelolaan hutan desa berada pada Kuadran I seperti pada Gambar 2. Strategi yang dapat dilakukan yaitu memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang. Pada kondisi ini, faktor internal dan eksternal dapat digunakan secara bersamaan untuk saling menguntungkan. Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada, sehingga peluang bisa dipecah dan ditingkatkan (Zola & Chamdra, 2023; Aisiyaturrochayah & Chusnah, 2021). *Rapid Growth strategy* dalam pengelolaan

hutan desa mengacu pada upaya untuk mengembangkan potensi hutan secara cepat dan agresif guna menangkap peluang pertumbuhan. Adapun strategi untuk pengelolaan Hutan Desa Bumi Lestari terdapat pada Gambar 3. Meskipun tidak terdapat informasi spesifik mengenai penerapan strategi pertumbuhan cepat dalam pengelolaan hutan desa, konsep ini dapat mencakup kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil hutan, memperluas areal hutan yang dikelola, serta mengembangkan usaha-usaha ekonomi masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.



Gambar 2. Diagram SWOT Pengelolaan Hutan Desa Bumi Lestari

Strategi Strength-Opportunities (S-O) • Memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait dan dukungan pemerintah daerah untuk mendukung pengelolaan hutan lestari dan pelibatan masyarakat • Mengambil peluang dari program insentif pemerintah untuk pelestarian hutan dan pengembangan ekowisata • Meningkatkan keahlian manajerial dan teknis dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan • Mengantisipasi ancaman illegal logging dan kebakaran hutan lahan dengan cara memperkuat pengawasan dan penegakan hukum • Mengantisipasi ancaman perubahan iklim dan bencana alam dengan cara melakukan restorasi ekosistem	Strategi Weaknes-Opportunities (W-O) • Kerjasama dengan pendamping dan mitra dalam peningkatan kemampuan penggunaan teknologi, administrasi, dan pengolahan produk turunan ikan yang lebih modern • Menggunakan pendanaan dari mitra untuk menciptakan inovasi produk untuk meningkatkan variasi • Peningkatan KUPS melalui sektor wisata melalui kemitraan dengan pemerintah (Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Bappeda, dll) dan berbagai yayasan swasta.
Strategi Strength-Threats (S-T) • Melalui pendekatan partisipatif dan program penyuluhan untuk peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan hutan. • Memanfaatkan pendampingan untuk peningkatan kapasitas pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat. • Pengembangan model pengelolaan hutan yang adaptif terhadap perubahan iklim • Mendorong percepatan proses revisi batas hutan desa melalui pendampingan yayasan dan bantuan pemerintah desa • Diferensiasi produk HHBK dan jaringan pemasaran yang inovatif • Penguatan pengawasan dan advokasi terhadap penambangan ilegal yang merusak lingkungan melalui musyawarah	Strategi Weaknes-Threats (W-T) • Studi banding LPHD untuk peningkatan motivasi dan pembelajaran inovasi • Motivasi KUPS ditingkatkan untuk melakukan inovasi produk turunan HHBK, lebih kreatif dalam desain produk, dan strategi pemasaran • Sistem produksi serentak dapat diterapkan untuk menghasilkan produk dalam waktu yang sama sehingga pengangkutan produk menuju pusat kecamatan dalam dilakukan sekaligus sehingga menekan biaya transportasi • Optimalisasi produk lain yang tidak terpengaruh langsung oleh cuaca, contoh pengolahan produk turunan ikan dalam jumlah besar saat panen dan ekowisata.

Gambar 3. Matrik Analisis Strategi Pengelolaan Hutan Desa Bumi Lestari

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan aktor internal dan eksternal yang telah diperoleh maka strategi pengelolaan Hutan Desa Bumi Lestari sesuai menggunakan strategi Strength-Opportunities. Posisi pertemuan faktor internal dan eksternal terdapat pada Kudran I sehingga dapat diterapkan Rapid Growth Strategy. Kekuatan berupa pendampingan, legalitas, pendanaan, kelimpahan sumber daya alam, dan kesamaan budaya dapat

dipertahankan untuk memperbesar adanya peluang-peluang untuk kemajuan masyarakat di Hutan Desa Bumi Lestari. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan yaitu : (1) memperkuat kemitraan dan mengambil peluang dari program insentif pemerintah dan lembaga donor untuk pelestarian hutan berlanjut, (2) meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam perhutanan sosial, (3) Meningkatkan keahlian manajerial dan teknis dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, (4) Mengantisipasi ancaman illegal logging dan kebakaran hutan lahan dengan cara memperkuat pengawasan, dan

(5) melakukan restorasi ekosistem dan memaksimalkan potensi ekowisata untuk menghadapi ancaman perubahan iklim dan pengelolaan hutan lestari yang berkelanjutan.

Saran

Pendampingan secara intensif sangat diperlukan dalam tata kelola administrasi dan manajemen kegiatan LPHD Bumi Lestari. Bentuk kegiatan dapat berupa diskusi evaluasi dan tindak lanjut yang realistis untuk diimplementasikan. Perhutanan sosial saat ini menjadi topik menarik bagi elemen baik pemerintahan, akademisi, maupun swasta. Oleh karena itu, dapat dijalin kolaborasi antar LPHD untuk pemenuhan kebutuhan dalam pengelolaan hutan desa. Contohnya, pelatihan, pemasaran, dan pertukaran ide kreatif inovatif bagi pengembangan produk usaha perhutanan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Yayasan PRCF Indonesia dan LPHD Bumi Lestari yang telah mendukung dan membantu dalam proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. 2020. Strategi Pengembangan Peluang Pasar Tanaman Herbal Di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Optima*, 3(2), 8. <https://doi.org/10.33366/optima.v3i2.1753>
- Aisiyaturrochayah, T. T., & Chusnah, M. 2021. Strategi Pengembangan Jambu Gondang Manis Jombang. *Jurnal Sigmagri*, 1(02), 112–120.
- Azwar, B., Roza, D., Thamrin, H., & Elfiandri, E. 2021. Strategi keberlanjutan pengelolaan hutan larangan adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Propinsi Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 8(1), 57. <https://doi.org/10.31258/dli.8.1.p.57-64>
- Kardiman. 2022. Analisis Bioekonomi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lestari di Sumatera dan Sumatera Barat. *Jurnal Agrisia*, 14(2), 28–40.
- <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/3/article/view/1033>
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2014. Surat Keputusan No.733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat. Jakarta : Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kirana, M. A., Latifah, S., & Hidayati, E. 2022. Strategi Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar, Lombok. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Kehutanan Indonesia E*, 1(1), 1–15.
- Matnuril, Jeddawi, M., Kusworo, & Supriyadi, B. 2019. Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi taman nasional tessio nilo dalam menjaga kelestarian fungsi hutan di kabupaten pelalawan, provinsi riau, indonesia. *Media Bina Ilmiah*, 13(11), 768–771.
- Norsidi, N. 2019. Strategi Pengembangan Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Lubuk Beringin. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 6(1), 38–52. <https://doi.org/10.31571/sosial.v6i1.1231>
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Putra, F. A. (2018). The function of Adat Rimbo Tujuh Danau Forest in Buluh Cina Village Siak Hulu, Kampar Regency. *Jom Fisip*, 5(1), 1–14.
- Sekartaji, D. A., Markum, & Setiawan, B. (2023). Strategi Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Di Desa Bukit Tinggi Kabupaten Lombok

Barat. *Jurnal Rimba Lestari*, 2(2), 88–98.
<https://doi.org/10.29303/rimbalestari.v2i2.456>

Syarifuddin, U., Ilyas, G. B., Misbahuddin, Mustafa, H., & Sani, A. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Kerajinan Anyaman Rotan dan Bambu melalui Pemasaran Online di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 2(2), 1–24. www.ekrut.com

Wijaya, R. S., Wiyatiningsih, S., Harijani, W. S., & Sentoso, W. (2020). Strategi Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pertanian Jeruk Pamelon Di Desa Tambakmas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. *Berkala Ilmiah AGRIDEVINA*, 8(2), 159–171.
<https://doi.org/10.33005/adv.v8i2.1931>

Zola, M. R., & Chamdra, S. S. P. P. S. (2023). Strategi Pengembangan Agrowisata Kolam Pancing P4S Karya Agri di Kelurahan Batupat Kecamatan Alak Kota Kupang. *Buletin Ilmiah IMPAS*, 24(1), 35–44.